

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

PT. Daya Matahari Utama adalah salah satu perusahaan yang pada awal berdiri bergerak dibidang dagang. Perusahaan ini merupakan milik organisasi Muhammadiyah yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2007 untuk mempermudah gerak aktifitas dakwah organisasi Muhammadiyah. Saat ini PT. DMU dipimpin oleh Abdullah Smith. Terletak pada ruko di Jl. Ahmad Yani no. 151 Surabaya, yang kemudian diberi nama Muhammadiyah Bussines Centre. Ruko sebelah selatan digunakan untuk toko yang diberi nama Surya Mart yang menyediakan khusus oleh – oleh Haji dan Umroh, ruko bagian utara digunakan sebagai kantor Pusat.

1. Visi dan Misi PT. DMU

Visi misi perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk siapapun terutama yang akan merintis usaha. Visi misi diresmikan pada 5 Januari 2007 oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, visi misi ini akan memandu jalannya usaha hingga sampai tujuan yang diinginkan. Seperti halnya pada PT. DMU yang juga memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan usahanya. Adapun visi dan misi PT. DMU sebagai berikut :

a) Visi PT. DMU

“Menjadi pusat pengembangan ekonomi sebagai sarana pendukung misi dakwah Muhammadiyah”

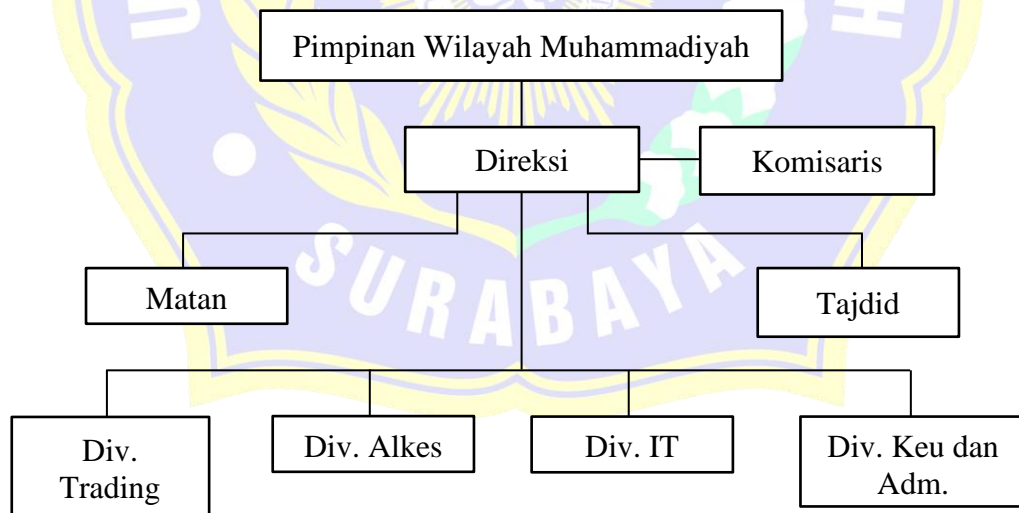
b) Misi PT. DMU

- 1) Memberikan pelayanan yang profesional dan paripurna
- 2) Memberikan Branch Mark Ekonomi Persyarikatan Muhammadiyah
- 3) Melaksanakan Dakwah Islamiyah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.

2. Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan sebuah perusahaan yang maju dan berkembang, maka sangat diperlukan sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tersebut yang terdiri mulai dari direktur utama, staf, karyawan, dan lain – lain. Karena dengan dibentuknya struktur organisasi yang demikian, akan mempermudah tercapainya tujuan sebuah perusahaan (James dalam Lailatul, 2018).

Berikut struktur Organisasi PT. DMU :



Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Daya Matahari Utama

(Sumber: PT. Daya Matahari Utama, 2020)

a) Direksi

Direksi ditunjuk sebagai yang menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan untuk mencapai visi dan misi perusahaan demi kepentingan terbaik perusahaan.

b) Komisaris

Komisaris ditunjuk untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen atas kebijakan yang akan diambil oleh manajemen tepatnya Dewan Direksi.

c) *Tajdid*

Merupakan salah satu divisi yang didirikan untuk melayani sekolah – sekolah dan sebuah divisi yang melayani pelatihan baca Al-Quran dengan cepat dan menyenangkan.

d) Matan

Majalah Muhammadiyah yang memberikan kajian – kajian tentang islam seputar muhammadiyah, yang berada dibawah naungan PT. DMU.

e) Divisi IT

Organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah juga tidak mau ketinggalan dengan zaman. Oleh karena itu PT. DMU menjadikan organisasi Muhammadiyah menjadi lebih berkembang dengan diproduksinya beberapa produk IT, seperti:

- 1) Paket Laboratorium Multimedia
- 2) CCTV *Package*, dll.

f) Divisi Alat Kesehatan

Meski masih di pegang oleh divisi trading tetapi langsung dalam pengawasan Direksi. Saat ini dikembangkan ke pemilikan saham terbesar Pabrik Infus di Pandaan.

g) Divisi *Trading*

Selain melayani penjualan buku ISMUBA (Keislaman, KeMuhammadiyah dan Bahasa Arab), buku Tajdied, buku saku dan baik seragam siswa, juga melayani segala Kebutuhan Sekolah, Rumah Sakit, Universitas dan juga perkantoran lainnya. Seperti alat – alat kantor, CCTV, LCD, meubeler, konveksi almamater, toga, dan percetakan majalah serta pamflet.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa divisi diatas dibentuk tidak lain untuk mempermudah proses dakwah Muhammadiyah.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap di PT. Daya Matahari Utama sebagai berikut:

1. Gaji Pokok

Sejumlah uang yang diterima oleh pegawai sesuai dengan tamatan pendidikan dan golongan yang bersangkutan. Gaji pokok dianggap sebagai kompensasi terhadap beban kerja dan tanggung jawab pegawai pada tugas yang diembannya di perusahaan.

2. Tunjangan Jabatan

Merupakan penambahan nilai nominal gaji yang didasarkan pada jabatan atau posisi pegawai dalam PT. DMU.

3. Tunjangan Makan

Uang makan yang diberikan dalam bentuk tunai dapat dibebankan perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Namun dari sisi pegawai akan menambah jumlah PPh Pasal 21 karena tunjangan secara tunai merupakan penambah penghasilan bagi pegawai. Hal ini merupakan tergolong dalam *Benefit in cash*.

4. Tunjangan Kehadiran

Tunjangan kehadiran diberikan guna mengapresiasi pegawai dalam disiplin absensi selama bekerja.

5. Tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan dan BPJS.

Kesehatan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang berpengaruh pada efisiensi kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan memberi tunjangan kesehatan dalam bentuk uang tunai untuk pegawainya.

6. Biaya Jabatan

Merupakan pengurang dari penghasilan setiap pegawai, tanpa memandang tingkatan jabatannya.

7. Iuran Kesehatan

Iuran – iuran yang harus dibayar berkaitan dengan jaminan kesehatan pegawai.

Tabel 4.1
DAFTAR GAJI
PT. DAYA MATAHARI UTAMA
2019

No	Nama	St	TMT	Gaji pokok	Jabatan	makan	Tunjangan kehadiran	kesehatan	BPJS	Jumlah gaji	PPH	Potongan kesehatan	bpjs	Disiplin	Total Potongan	Gaji Neto
1	A	L	S1	3.485.681	2.000.000	1.000.000	2.000.000			8.485.681	199.284			800.000	999.284	7.486.397
2	B	L	D3	4.304.101	500.000	500.000	1.000.000	168.019	164.132	6.636.252	106.813	210.024	241.553	300.000	858.390	5.777.862
3	C	k/3	S1	3.323.556	2.000.000	750.000	1.500.000	168.019	164.132	7.905.707	95.285	210.024	241.553	496.228	1.043.091	6.862.616
4	D	L	S1	3.485.681	2.000.000	1.000.000	2.000.000			8.485.681	239.141			339.427	578.568	7.907.113
5	E	K/2	D3	2.933.828	2.000.000	750.000	1.500.000	168.019	164.132	7.515.979	94.549	210.024	241553	120.000	1.116.765	6.399.214
6	F	K2	D-3	4.304.101	500.000	500.000	1.000.000	168.019	164.132	6.636.252	50.563	210.024	241553		502.140	6.134.113
7	G	K/3	S1	5.942.781	2.000.000	1.000.000	2.000.000			10.942.781	247.139			437.711	684.850	10.257.931
	Total			27.779.729	11.000.000	5.500.000	11.000.000	672.076	656.528	56.608.333	1.032.773	840.096	966.212	2.493.367	5.783.087	50.825.245

Sumber: PT. Daya Matahari Utama, 2020

C. Pembahasan

1. Perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan *Net Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap selama setahun pada PT. Daya Matahari Utama dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel 4.2.

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dengan *Net Method* maupun *Gross* hasilnya akan sama, yang membedakan hanya pada penghasilan yang akan diterima pegawai dan biaya yang menjadi tanggungan perusahaan. Pada *Gross Method*, pegawai akan menerima penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21 terutang. Sedangkan pada *Net Method*, Pegawai akan menerima penghasilan yang hanya dipotong pengurang penghasilan seperti premi asuransi. Sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pegawai akan menjadi tanggungan perusahaan.

2. Perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap selama setahun pada PT. Daya Matahari Utama dengan menggunakan *Gross Up Method* dapat dilihat pada tabel 4.3. Pada metode *Gross Up*, terdapat komponen tambahan yakni tunjangan pajak. Tunjangan pajak ini besarnya sama sejumlah PPh 21 terutang atas pegawai tetap.

Tabel 4.2 Perhitungan *Net Method*

(Dalam Rupiah)

Nama	St	Gaji	Tunjangan Jabatan	Uang Makan	Tunjangan Kehadiran	Tunjangan Kesehatan	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Kesehatan	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang	PPh 21 /Bulan
A	Tk	41.828.172	24.000.000	12.000.000	14.400.000		92.228.172	4.611.409		87.616.763	54.000.000	33.616.763	1.680.838	140.070
B	Tk	51.649.212	6.000.000	6.000.000	8.400.000	3.985.812	76.035.024	3.801.751	5.418.924	66.814.349	54.000.000	12.814.349	640.717	53.393
C	k/3	39.882.672	24.000.000	9.000.000	12.045.264	3.985.812	88.913.748	4.445.687	5.418.924	79.049.137	72.000.000	7.049.137	352.457	29.371
D	Tk	41.828.172	24.000.000	12.000.000	19.926.876		97.755.048	4.887.752		92.867.296	54.000.000	38.867.296	1.943.365	161.947
E	k/2	35.205.936	24.000.000	9.000.000	16.560.000	3.985.812	88.751.748	4.437.587	5.418.924	78.895.237	67.500.000	11.395.237	569.762	47.480
F	k/2	51.649.212	6.000.000	6.000.000	12.000.000	3.985.812	79.635.024	3.981.751	5.418.924	70.234.349	67.500.000	2.734.349	136.717	11.393
G	k/3	71.313.372	24.000.000	12.000.000	18.747.468		126.060.840	6.000.000		120.060.840	72.000.000	48.060.840	2.403.042	200.254
Total		333.356.748	132.000.000	66.000.000	102.079.608	15.943.248	649.379.604	32.165.938	21.675.696	595.537.970	441.000.000	154.537.970	7.726.898	643.908

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Tabel 4.3 Perhitungan *Gross Up Method*

(Dalam Rupiah)

Nama	St	Gaji	Tunjangan Jabatan	Uang Makan	Tunjangan Kehadiran	Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Pajak	Peghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Kesehatan	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21 Terutang	PPh 21 /Bulan
A	Tk	41.828.172	24.000.000	12.000.000	14.400.000		1.769.303	93.997.475	4.699.874		89.297.602	54.000.000	35.297.602	1.769.303	147.442
B	Tk	51.649.212	6.000.000	6.000.000	8.400.000	3.985.812	674.439	76.709.463	3.835.473	5.418.924	67.455.066	54.000.000	13.455.066	674.439	56.203
C	k/3	39.882.672	24.000.000	9.000.000	12.045.264	3.985.812	371.007	89.284.755	4.464.238	5.418.924	79.401.593	72.000.000	7.401.593	371.007	30.917
D	Tk	41.828.172	24.000.000	12.000.000	19.926.876		2.045.647	99.800.695	4.990.035		94.810.660	54.000.000	40.810.660	2.045.647	170.471
E	k/2	35.205.936	24.000.000	9.000.000	16.560.000	3.985.812	599.749	89.351.497	4.467.575	5.418.924	79.464.998	67.500.000	11.964.998	599.749	49.979
F	k/2	51.649.212	6.000.000	6.000.000	12.000.000	3.985.812	143.913	79.778.937	3.988.947	5.418.924	70.371.066	67.500.000	2.871.066	143.913	11.993
G	k/3	71.313.372	24.000.000	12.000.000	18.747.468		2.598.972	128.659.812	6.000.000		122.659.812	72.000.000	50.659.812	2.598.972	216.581
Total		333.356.748	132.000.000	66.000.000	102.079.608	15.943.248	8.203.031	657.582.635	32.446.141	21.675.696	603.460.798	441.000.000	162.460.798	8.203.031	683.586

Sumber: Diolah Penulis, 2020

(PPh 21 terutang selisih 80.000 dari yang asli akibat pembulatan)

Tabel 4.4 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan 3 metode
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ditanggung Karyawan (Gross Method)	Ditanggung Perusahaan (Net Method)	Ditunjang Perusahaan (Gross Up Method)
	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
Gaji	333.356.748	333.356.748	333.356.748
Tunjangan jabatan	132.000.000	132.000.000	132.000.000
Uang Makan	66.000.000	66.000.000	66.000.000
Tunjangan Kehadiran	102.079.608	102.079.608	102.079.608
Tunjangan Kesehatan	15.943.248	15.943.248	15.943.248
Tunjangan Pajak	0	0	8.203.031
Penghasilan Bruto	649.379.604	649.379.604	657.582.635
Biaya Jabatan	32.165.938	32.165.938	32.446.141
Iuran Kesehatan	21.675.696	21.675.696	21.675.696
Penghasilan Neto	595.537.970	595.537.970	603.460.798
PTKP	441.000.000	441.000.000	441.000.000
PKP	154.537.970	154.537.970	162.460.798
PPh 21 setahun	7.726.898	7.726.898	8.203.031
Tunjangan Pajak	0	0	8.203.031
PPh 21 yang harus disetor / dipotong dari penghasilan karyawan	7.726.898	7.726.898	0

Sumber : Diolah Penulis, 2020

Tabel 4.5 Take Home Pay

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ditanggung Karyawan (Gross Method)	Ditanggung Perusahaan (Net Method)	Ditunjang Perusahaan (Gross Up Method)
	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III
Gaji	333.356.748	333.356.748	333.356.748
Tunjangan jabatan	132.000.000	132.000.000	132.000.000
Uang Makan	66.000.000	66.000.000	66.000.000
Tunjangan Kehadiran	102.079.608	102.079.608	102.079.608
Tunjangan Kesehatan	15.943.248	15.943.248	15.943.248
Tunjangan Pajak	0	0	8.203.301
Penghasilan Bruto	649.379.604	649.379.604	657.582.635
PPh Pasal 21	7.726.898	7.726.898	8.203.031
Total Take Home Pay	641.652.706	649.379.604	649.379.604

Sumber: Diolah Penulis, 2020

a) PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (*Gross Method*)

Pada metode ini, jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan pegawai, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh tersebut. Jika dilihat dari sisi pegawai, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba karena tidak mengeluarkan beban pajak.

a) PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*Net Method*)

Pada metode ini PPh akan sepenuhnya menjadi beban perusahaan. Karena jumlah PPh Pasal 21 tidak akan dimasukkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka tidak diperbolehkan untuk mengurangnya dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya *deductible expense*. Perhitungan *Net method* mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar dari perhitungan semula. Namun, apabila dilihat dari sisi pegawai, metode ini bisa menguntungkan. Karena penghasilan yang akan diterima oleh pegawai tetap utuh tidak dikurangi pph 21.

b) PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan (*Gross Up Method*)

Jika dilihat sepintas, metode ini sama dengan Net, namun keduanya berbeda dalam perhitungan karena tunjangan pajak akan ditambahkan ke gaji pokok sehingga angka tunjangan pajak harus sama dengan PPh 21 terutang yang harus dibayar.

Perhitungan metode ini sering dianggap rumit, karena harus menyelesaikan 2 langkah, yaitu menghitung tunjangan pajaknya

terlebih dahulu dan kemudian mengitung potongan pajaknya. Dalam metode *Gross Up*, terlihat tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima pegawai (*take home pay*), namun untuk perhitungan *gross up* penghasilan pegawai menjadi lebih besar sebesar PPh yang ditambahkan.

Apabila dilihat dari sisi komersial, kebijakan menerapkan metode ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar sehingga tampak seperti pemborosan. Seperti yang terlihat pada tabel 4.5 dimana PPh Pasal 21 yang jumlahnya lebih besar dari metode – metode lain dengan nominal Rp 8.203.301,-

Dari hasil perbandingan tabel 4.4 PPh pasal 21 antara metode *Net* dengan metode *Gross up*, dapat terlihat bahwa setelah pemberian tunjangan pajak, penghasilan netto yang diterima pegawai naik, walaupun jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar ikut naik juga. penghasilan netto naik menjadi Rp 603.460.798,- atau sekitar 1,33%. Kenaikan penghasilan netto juga bersamaan dengan kenaikan PPh 21 menjadi Rp 8.203.031,- atau sekitar 6,16%.

Tabel 4.6 Perhitungan Laba Rugi Fiskal

(Dalam Rupiah)

Uraian	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross Up</i>
Penjualan*	3.500.000.000	3.500.000.000
HPP*	1.500.000.000	1.500.000.000
Laba Kotor Usaha	2.000.000.000	2.000.000.000
Beban:		
Beban Gaji, bonus, dll	649.379.604	649.379.604
Tunjangan PPh	-	8.203.031
Beban Lainnya*	60.000.000	60.000.000

Total Beban	709.379.604	717.582.635
Laba Bersih Sebelum Pajak	1.290.620.396	1.282.417.365
PPH Badan	322.655.099	320.604.341
Laba Bersih Setelah Pajak	967.965.297	961.813.024

Sumber: Diolah Penulis, 2020

(*nominal permisalan)

Tabel 4.7 Perbandingan Efek Pajak *Net* Dengan *Gross Up*
(Dalam Rupiah)

	Metode <i>Net</i>	Metode <i>Gross Up</i>	Efek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap	7.726.898	8.203.031	Naik 476.133
Pajak Penghasilan Badan	322.655.099	320.604.341	Turun 2.050.758
Pajak Penghasilan yang disetor ke kas negara	330.381.997	328.807.372	Turun 1.574.625

Sumber: Diolah Penulis, 2020

Walaupun tunjangan pajak membuat jumlah PPh Pasal 21 lebih besar, tapi hal itu tertutupi dengan kenaikan penghasilan karyawan. Pada tabel 4.6, Pemberian tunjangan ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi secara menyeluruh berdampak pada pajak penghasilan terutang PT. Daya Matahari Utama. Semua tunjangan yang berbentuk tunai dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga jumlah pajak badan terutang yang dibayarkan juga berkurang.

Bisa dikatakan bahwa metode *Gross Up* menguntungkan bagi pegawai yang mana gaji yang diperoleh tidak berkurang serta menguntungkan bagi perusahaan karena bisa lebih menghemat (lihat tabel 4.7).